

Policy Network dalam Pengembangan Pariwisata Kota Berkelanjutan di Kota Yogyakarta

Policy Network in Sustainable Urban Tourism Development in Yogyakarta City

Victoria Maharani¹, Pandhu Yuanjaya²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima xx-xx-xx

Diperbaiki xx-xx-xx

Disetujui xx-xx-xx

Kata Kunci:

Jejaring Kebijakan,
Pariwisata Kota
Berkelanjutan, Analisis
Jaringan Kualitatif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan dalam pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *Qualitative Network Analysis* (QNA) oleh Ahrens (2018) dengan tiga indikator yang dianalisis yaitu *type of ties*, *type of level governance*, dan *type of policy goals*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *policy network* dalam pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta terbentuk oleh adanya pola ketergantungan dan kebutuhan sumber daya. Adapun hasilnya, (1) Jenis ikatan yang terjalin didasarkan pada kolaborasi yang dilakukan dan tidak ada peraturan hukum yang mengikat hubungan tersebut, tetapi ada pedoman dalam pelaksanaannya yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang RIPPARDA Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. (2) Jenis tingkat pemerintahan antar aktor dijalankan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi hierarki yang ada dalam pemerintahan sehingga tidak ada dominasi kekuasaan dan persaingan. (3) Jenis tujuan kebijakan yang dikeluarkan dari masing-masing aktor berbeda sesuai dengan fokusnya. Oleh karena itu, perlu membuat satu kebijakan yang komprehensif untuk menyatukan antar pemangku kepentingan dalam proses *policy network* dengan tujuan pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

Keywords:

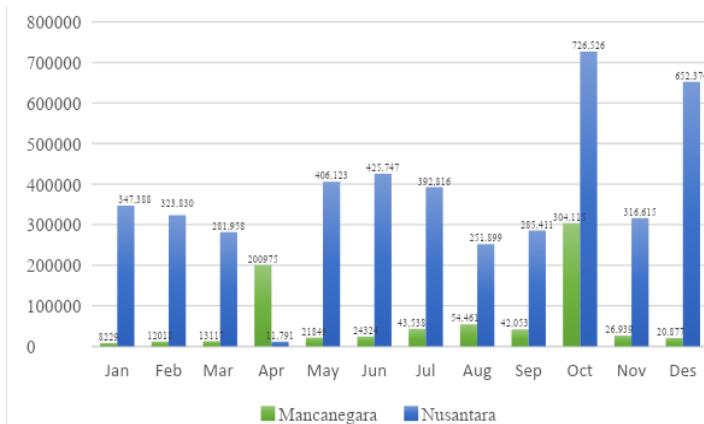
Policy Network, Sustainable Urban Tourism, Qualitative Network Analysis (QNA)

This research aims to analyze the policy network in developing sustainable urban tourism in the city of Yogyakarta. This research method uses qualitative descriptive research. The data collection techniques for this research are interviews, observation and documentation. This research uses the Qualitative Network Analysis (QNA) theory by Ahrens (2018) with three indicators analyzed, namely type of ties, type of level governance, and type of policy goals. The research results show that the policy network in developing sustainable urban tourism in the city of Yogyakarta is formed by patterns of dependency and resource needs. As for the results, (1) The type of bond that exists is based on the collaboration carried out and there are no legal regulations that bind this relationship, but there are guidelines for its implementation, namely Perda Number 3 of 2015 about RIPPARDA Kota Yogyakarta for 2015-2025. (2) The types of levels of government between actors are carried out in accordance with the tasks, principals and hierarchical functions that exist in government so that there is no domination of power and competition. (3) The types of policy objectives issued by each actor differ according to their focus. Therefore, it is necessary to create a comprehensive policy to unite stakeholders in the policy network process with the aim of developing sustainable urban tourism in the city of Yogyakarta.

1. Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki *multiplier effect* di mana mampu menggerakkan perekonomian negara. Hadirnya sektor pariwisata ini juga mampu mengubah paradigma pengembangan negara secara meluas [1]. Hal ini dibuktikan dengan adanya ekspansi dan diversifikasi sektor pariwisata yang mana mampu meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi secara lebih cepat dan lebih besar pertumbuhannya di dunia [2]. Meningkatnya fenomena pariwisata secara global, kemudian berimplikasi pada wajah baru pengembangan sektor pariwisata dengan wilayah metropolitan atau kota sebagai salah satu objek daya tarik wisata. Menurut [2], ciri khas pariwisata kota yaitu bentuk dari penggunaan fasilitas kota yang ada sebagai daya tarik wisata dan digunakan oleh masyarakat kota, wisatawan lokal, maupun wisatawan mancanegara. Daya tarik wisata perkotaan difokuskan dalam penggunaan fasilitas perkotaan yang dapat digunakan oleh wisatawan.

Perkembangan pariwisata kota perlu diimbangi dengan upaya untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah program pembangunan pariwisata yang mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, hambatan yang muncul, serta upaya untuk mengatasi kemungkinan yang bisa terjadi [3]. Perkembangan pariwisata kota yang semakin pesat ini kemudian diselaraskan dengan konsep berkelanjutan. Salah satu kota yang menerapkan konsep pariwisata kota berkelanjutan adalah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah metropolitan menawarkan daya tarik wisata berupa wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata buatan, serta wisata belanja. Terdapat kurang lebih 41 objek wisata yang ditawarkan dan membantu peningkatan kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data [4], jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebanyak 1.384.781 pengunjung, tahun 2021 sebanyak 1.276.828 pengunjung, tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 7.444.893 pengunjung, kemudian tahun 2023 sebanyak 4.498.925 pengunjung. Adapun data terakhir kunjungan wisata per bulan pada tahun 2023 yang tercatat di Kota Yogyakarta sebagai berikut



Gambar 1. Data Kunjungan Wisata per Bulan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (2023)

Seiring dengan perkembangan zaman, citra dari pariwisata kota di Kota Yogyakarta mulai berubah dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahannya terkait dengan lingkungan yaitu penumpukan sampah di beberapa kawasan wisata dan permasalahan sosial berkaitan dengan adanya tindak kriminalitas yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat maupun wisatawan [5]. Melihat permasalahan tersebut, hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mempertahankan eksistensi pariwisata. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam pengembangannya khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan, penentuan cara atau metode dalam penggunaan sarana-prasarana, serta penentuan tujuan yang akan dicapai. Sinergi dari berbagai pihak dalam lingkup Pemerintahan Kota Yogyakarta sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan pariwisata.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata kota berkelanjutan yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Peraturan disusun dalam rangka memberikan arah pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinergi dan selaras dengan kondisi wilayah maupun masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta [6]. Tidak hanya itu, kebijakan dari aktor lain dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta juga turut membantu dalam menyelesaikan permasalahan pariwisata. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya sinergi kebijakan atau jejaring kebijakan yang terjalin dari masing-masing aktor dalam pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Jejaring kebijakan (*policy network*) merupakan prespektif yang mengungkapkan adanya hubungan dari para pemangku kepentingan. Pandangan dalam jaringan kebijakan ini didasarkan pada ketergantungan akan kekuasaan yang terjadi antara pemerintah dan kelompok kepentingan yang saling tukar sumber daya [7]. Dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya belum optimalnya sinergi dan sinkronisasi antar aktor, ego sektoral antar aktor, kurangnya komunikasi dan koordinasi, perbedaan persepsi dan keinginan, serta standar kebijakan yang berbeda.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan, masih terdapat *research gap* yaitu kurangnya analisis terkait dengan jejaring kebijakan dalam kaitannya pengembangan pariwisata kota berkelanjutan. Pada penelitian [8] menemukan bahwa diperlukan adanya pemahaman bagi para *policy maker* terkait model jejaringan kebijakan sebagai fokus yang tidak hanya menuntut keterlibatan antar aktor sebagai partisipan, tetapi juga hubungan yang saling menguntungkan. Penelitian [9] menjelaskan bahwa dimensi relasi aktor dapat mencerminkan kesiapan aktor kebijakan mengelola jejaring untuk mencapai tujuan bersama dalam pelaksanaan kebijakan. Proses jejaring kebijakan bisa saja belum optimal karena ada beberapa hal yang mendasari. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki fokus hubungan yang terjalin antar aktor dalam dimensi *policy network* (jejaring kebijakan). Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian bagaimana *policy network* dalam pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teori *Qualitative Network Analysis* (QNA) dari Ahrens [10] beberapa pendekatan yang dianalisis yaitu jenis ikatan,

jenis tingkat pemerintahan, serta jenis tujuan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu Administrasi Publik, bagi peneliti, bagi Pemerintah Kota Yogyakarta maupun swasta, dan bagi masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kondisi, fenomena, maupun gejala dengan apa adanya tanpa adanya manipulasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana menjadi salah satu kota dengan konsep *sustainable urban tourism*. Penelitian dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2024. Subjek penelitian terdiri atas instansi yang berada di lingkup Pemerintahan Kota Yogyakarta, swasta, masyarakat, dan wisatawan. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri [11]. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan *tools* UCINET 6 dalam rangka melihat hubungan yang terjalin antar aktor dalam proses *policy network* dengan menggunakan *software* yaitu *NetDraw* yang berfungsi dalam memvisualisasikan data jejaring sosial yang kemudian diubah menjadi graf. Penelitian akan melihat visualisasi dan *centralities* jejaring kebijakan melalui salah satu cara yaitu *betweenness centralities*.

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Yogyakarta memiliki kedudukan sebagai ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menjadi daerah tingkat II satu-satunya yang berstatus “kota” di antara empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus “kabupaten”. Hal tersebut yang membuat kota Yogyakarta terletak pada wilayah yang strategis karena berada di pusat kota. Batas-batas wilayah secara administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data [12], tercatat tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk di Kota Yogyakarta diperkirakan akan mencapai 461.225 jiwa dengan kepadatan rata-rata 14,191 jiwa/km² dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2025 sebanyak 466.950 dengan kepadatan rata-rata 14,267 jiwa/km². Peningkatan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta menjadi peluang dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan perekonomian. Salah satu sektor penting yang mendorong perkembangan ekonomi di Kota Yogyakarta adalah pariwisata.

Analisis dari pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap PDRB setiap kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Sleman dalam memberikan berkontribusi terhadap PDRB dimana nilai koefisiennya yaitu 203,28 yang artinya setiap tahunnya berkontribusi sebesar 203,28 juta rupiah terhadap PDRB melalui sektor pariwisata [13]. Selain

itu, data yang diperoleh dari [12], pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai 5,08 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari provinsi DIY yaitu 5,07 persen dan nasional sebesar 5,05 persen. Realisasi dari pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ini berhasil mencapai target yang ditentukan dari RPJMD/RPD dan juga Target Perjanjian Kinerja yang mana sebesar 4,20 – 5,40 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta ini paling utama didukung oleh sektor pariwisata dengan strategi penguatan lintas sektor berbasis bisnis dan sinergitas antar komponen 5K (Gandeng Gendong) diantaranya yaitu kampung, kampus, komunitas, korporat, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta yang semakin pesat dan banyak wisatawan yang datang ini kemudian berdampak pada munculnya eksternalitas. Adapun kondisi eksternalitas yang terjadi diantaranya *pertama*, wisatawan maupun masyarakat melanggar aturan, salah satunya terkait peraturan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). *Kedua*, permasalahan lingkungan yaitu adanya penumpukan sampah di sekitar kawasan wisata Kota Yogyakarta. *Ketiga*, permasalahan sosial terkait dengan adanya tindak kriminalitas atau kejahatan jalanan yang terjadi di sekitar kawasan wisata. Beberapa kondisi tersebut berakibat pada berubahnya citra pariwisata dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Yogyakarta.

Dibalik kondisi eksternalitas yang terjadi, Kota Yogyakarta dengan konsep pengembangan *sustainable urban tourism* ini sudah memiliki beberapa fasilitas kota yang mendukung. Fasilitas yang dimiliki diantaranya *Tourism Information Service*, tempat wisata belanja: Pasar Beringharjo, kawasan alun-alun kota: Alun-Alun Utara dan aSelatan, dan penginapan. Fasilitas kota inilah yang menjadi ciri khas pariwisata kota [14]. Selain itu, Kota Yogyakarta juga memiliki kurang lebih 41 objek dan daya tarik wisata yang terbagi dalam beberapa klasifikasi yaitu wisata pendidikan, wosata sejarah & budaya, wisata museum, wisata kuliner, wisata belanja, dan kampung wisata. Dalam upaya menjaga perkembangan pariwisata, ada beberapa program yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata diantaranya Jogja Vaganza, Festival Jeron Beteng, *Direct Promotion* (Promosi Langsung), Yogowes Monalisa, Festival Kampung Wisata, Pelatihan Pemandu Wisata, serta Bimbingan Teknis Usaha Jasa Pariwisata Menuju Halal.

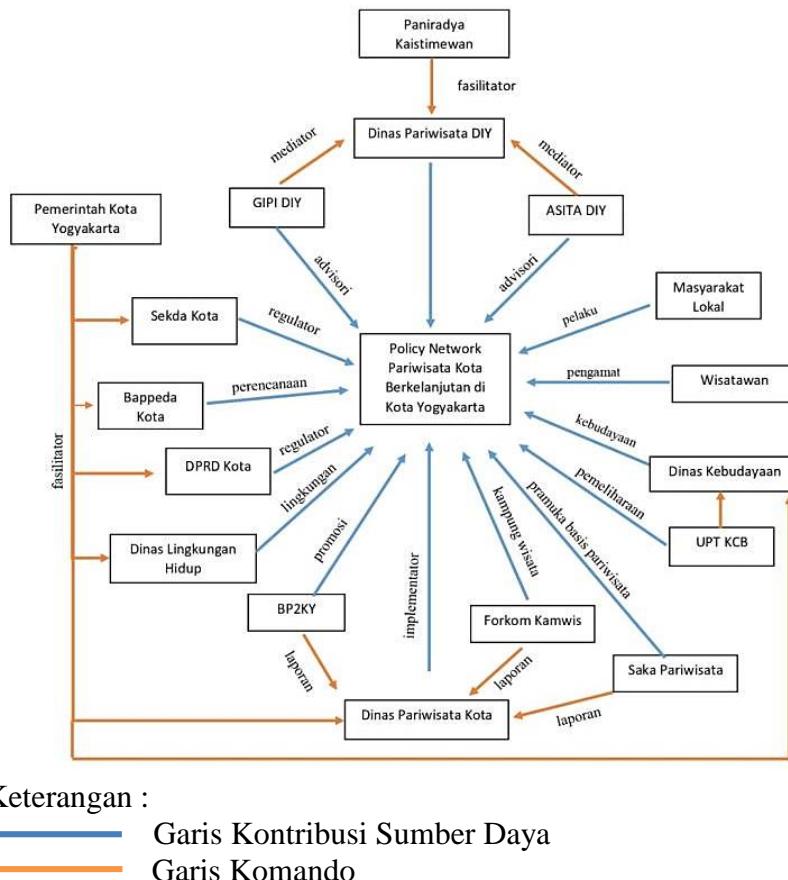
Pengembangan pariwisata kota berkelanjutan ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai aktor. Hal ini didasarkan pada konsep dari *policy network* yang berkaitan dengan adanya ketergantungan sumber daya antar aktor. Masing-masing aktor memiliki kontribusi dan peran dalam pengembangan pariwisata sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan potensi yang dimiliki. Adapun aktor yang berperan diantaranya yaitu beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kota Yogyakarta, swasta, masyarakat, dan wisatawan. Sesuai data yang diperoleh di lapangan, beberapa aktor tersebut memberikan kontribusi diantaranya perumusan kebijakan pariwisata, perencanaan pembangunan program pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan wisata, fungsi koordinatif dan *advisory*,

monitoring dan evaluasi kegiatan pariwisata, pengolahan sampah di kawasan wisata, penyediaan fasilitas untuk wisatawan, pengamat serta pelaku pariwisata.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata kota di Kota Yogyakarta sesuai data yang diperoleh di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan pada hubungan jejaring kebijakan yang terjalin. Permasalahannya yaitu ego sektoral antar aktor atau antar tingkatan instansi, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang berakibat pada *miscommunication*, perbedaan persepsi dan keinginan antar aktor, belum optimalnya sinergi dan sinkronisasi antar aktor, standar kebijakan yang berbeda, serta perbedaan perencanaan anggaran pariwisata. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis indikator *Qualitative Network Analysis* (QNA) oleh Ahrens (2018) [10] yang terdiri dari *type of ties* (jenis ikatan), *type of level governance* (jenis tingkat pemerintahan), serta *type of policy goals* (jenis tujuan kebijakan). Indikator tersebut dipilih untuk mengungkapkan hubungan yang terjalin antar aktor dalam proses *policy network* pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

3.1 Type of Ties (Jenis Ikatan)

Indikator jenis ikatan berkaitan dengan suatu hal yang menunjukkan adanya kerterikatan, kontak sepihak, dan hubungan timbal balik yang terjalin antar aktor dalam proses jejaring kebijakan yang berkaitan dengan pertukaran informasi, kolaborasi, persaingan, maupun signifikansi yang terjalin. Pada dasarnya ikatan yang terjalin dari masing-masing *stakeholder* ini terbentuk dari adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga membutuhkan bantuan dan kontribusi dari aktor lainnya sesuai dengan potensi maupun fokus yang dimiliki. Selain itu, jenis ikatan ini mampu memahami sifat dinamis dari penelitian seperti hubungan yang terjalin sehingga mampu membuka kebenaran terkait pentingnya makna dari para aktor yang saling terjalin dalam jaringan [15]. Jenis ikatan antar instansi dalam *policy network* pengembangan pariwisata kota di Kota Yogyakarta ini berkaitan dengan empat hal pokok diantaranya yaitu *pertama*, pertukaran informasi dimana dilakukan dengan adanya pertemuan atau rapat rutin dalam jangka waktu tertentu, pemberitahuan kegiatan melalui surat maupun undangan, serta pemanfaatan media sosial melalui *whatsapp group* (WAG). *Kedua*, kolaborasi yaitu sifatnya fleksibel dan antar intansi dalam melakukan kerja sama tidak ada peraturan hukum khusus yang mengikat karena ikatan yang terjalin adalah ikatan antar OPD di lingkup pemerintahan. *Ketiga*, tidak ada persaingan antar OPD di lingkup pemerintahan maupun dengan pihak lain di luar pemerintah. *Keempat*, hubungan kekuasaan yang terjalin di lingkup pemerintahan adalah sama atau setara karena dilakukan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan paling dominan, tetapi saling melengkapi.



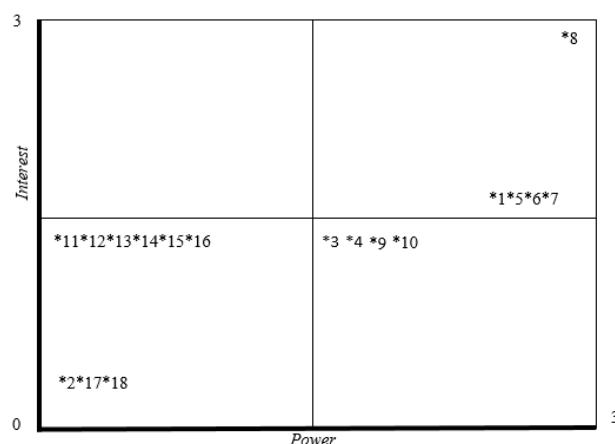
Gambar 2. Jejaring Kontribusi antar Aktor dalam *Policy Network*
 Sumber: diolah peneliti (2024)

Prespektif dalam jejaring kontribusi antar aktor dalam *policy network* ini menunjukkan bahwa ikatan yang terjalin antar aktor didasarkan pada potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk kemudian mendukung proses pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Terdapat dua garis yang membedakan yaitu garis komando dan garis kontribusi sumber daya. Garis kontribusi sumber daya menunjukkan bahwa masing-masing pemangku kepentingan sudah terlibat dalam proses jejaring kebijakan baik sebagai fasilitator, mediator, advisor, regulator, pemeliharaan, kebudayaan, perencanaan, lingkungan, promosi, implementator, pemeliharaan, kampung wisata, dan organisasi yang bergerak di bidang pariwisata. Selain itu, ada pula garis komando yang menunjukkan tanggung jawab yang perlu dilaporkan kepada pihak yang lebih tinggi hirarkinya atau yang menaungi aktor tersebut. Hal ini kemudian membentuk adanya hubungan saling ketergantungan antar aktor [16].

3.2 Type of Level Governance (Jenis Tingkat Pemerintahan)

Jenis tingkat pemerintahan merupakan salah satu indikator penting dalam upaya mengetahui tingkatan dalam lingkup tata kelola formal dan penyesuaian tanggung jawab di berbagai tingkatan atau dapat juga disebut sebagai hirarki

pemerintahan. Berdasarkan pandangan dari indikator ini, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin efektif pula jaringannya [7]. Berdasarkan hasil dari temuan penelitian, tingkat pemerintahan dari masing-masing aktor disesuaikan dengan adanya susunan hirarki dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang mana dipimpin oleh Walikota. Dalam upaya mencapai tujuan pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta, masing-masing aktor dalam menjalankan proses pemerintahannya berpedoman pada salah satu kebijakan yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. RIPPARDA ini menjadi komitmen dan kesepakatan seluruh elemen untuk mengembangkan pariwisata di Kota Yogyakarta.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dinas Pariwisata Provinsi DIY | 10. Forkom Kampung Wisata |
| 2. Paniradya Kaistimewan DIY | 11. Saka Pariwisata Kota Yogyakarta |
| 3. GIPI DIY | 12. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta |
| 4. ASITA DIY | 13. UPT Kawasan Cagar Budaya |
| 5. Sekda Kota Yogyakarta | 14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yk |
| 6. Bappeda Kota Yogyakarta | 15. Hotel Cavinton Yogyakarta |
| 7. DPRD Kota Yogyakarta | 16. Paguyuban Becak Motor Wisata |
| 8. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta | 17. Masyarakat Lokal |
| 9. BP2KY | 18. Wisatawan |

Gambar 3. Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Kepentingan (Interest) dan Pengaruh (Power) dalam Policy Network

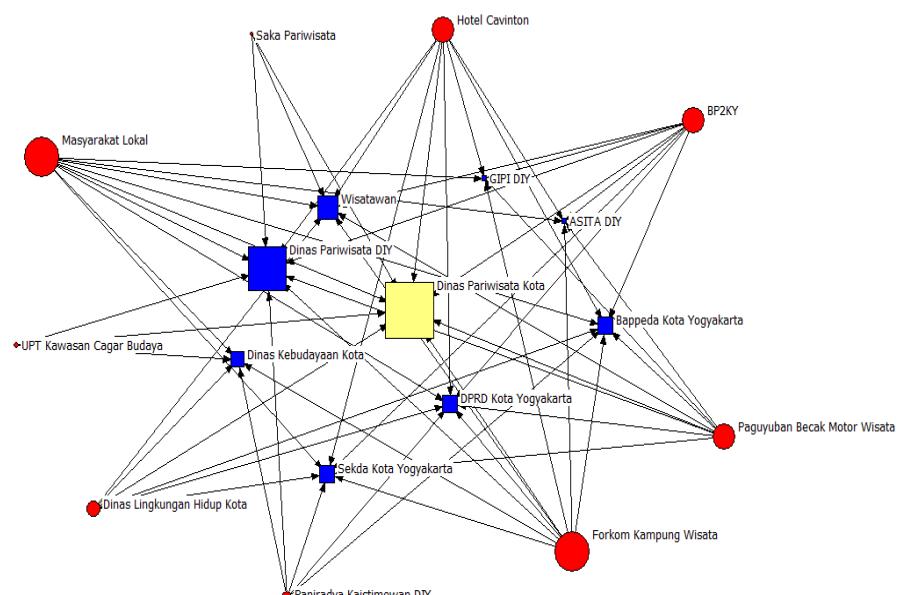
Sumber: data diolah peneliti (2024)

Dari data tersebut, diketahui bahwa tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan dari masing-masing aktor berbeda karena sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Aktor yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Disusul dengan Dinas Pariwisata DIY, Sekda Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, dan Bappeda Kota Yogyakarta. Sementara aktor yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang paling rendah diantaranya adalah Paniradya Kaistimewan, Masyarakat Lokal, serta Wisatawan. Perbedaan tinggi maupun rendah ini dilihat dari kontribusi dan peran masing-masing aktor dengan menggunakan skala mulai

dari angka nol sampai dengan angka tiga untuk menentukan seberapa jauh kontribusi dan pengaruh yang diberikan oleh masing-masing aktor. Selain itu, tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh masing-masing aktor dapat dilihat pula dari pola koordinasi atau hirarki yang ada dalam Pemerintahan Kota Yogyakarta.

3.3 Type of Policy Goals (Jenis Tujuan Kebijakan)

Indikator ini berfokus pada *goals* atau tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, dalam proses *policy network* dari indikator ini mampu menggambarkan jejaring kebijakan yang terjalin mengenai berbagai aspek, salah satunya perbedaan komposisi formal dan informal yang terjalin antar aktor [10]. Sesuai data hasil penemuan, terkait dengan pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta ini berpedoman pada kebijakan atau aturan hukum yaitu pada tingkat provinsi terdapat Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2025, kemudian di tingkat lebih khusus yaitu di kota terdapat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Tujuan dari adanya RIPPARDA ini adalah memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat yang ada di DIY, khususnya yang ada di Kota Yogyakarta. Tidak hanya itu, masing-masing aktor juga berkontribusi dengan adanya kebijakan yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan standar kebijakan dalam lingkup pemerintahan. Hal ini kemudian membentuk adanya jejaring kebijakan (*policy network*) yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang terjalin antar aktor tersebut.



Gambar 4. Visualisasi Policy Network antar Aktor
Sumber: data diolah peneliti menggunakan UCINET 6 (2024)

Dari gambar tersebut menggambarkan analisis visual dari jejaring kebijakan yang terjalin dari beberapa aktor dalam pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Terdapat satu aktor utama yang memiliki relasi yang kuat digambarkan dengan kotak *node* warna kuning paling besar, dimana hal ini menunjukkan bahwa aktor tersebut memiliki relasi atau keterkaitan paling banyak dibandingkan dengan aktor lainnya. Selain itu, ada beberapa aktor lain yang memiliki tingkat sentralitas tinggi karena terlihat memiliki koneksi maupun pengaruh yang tinggi dan mendukung aktor utama diantaranya yaitu Dinas Pariwisata DIY, Bappeda Kota, Sekda Kota, DPRD Kota, GIPI DIY, ASITA DIY, Dinas Kebudayaan Kota dan Wisatawan. Terdapat pula beberapa aktor pinggiran yang tergambar dengan *node* bulat yang mana memiliki relasi atau keterkaitan yang rendah diantaranya yaitu Paniradya Kaistimewan DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kota, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Paguyuban Becak Motor Wisata, serta Masyarakat Lokal. Aktor pinggiran yang memiliki pengaruh dan relasi paling rendah dengan bulatan *node* paling kecil adalah Saka Pariwisata.

Melalui analisis tersebut, terlihat bahwa jejaring kebijakan ini melihat sentralitas aktor berdasarkan pada sentralitas keperantaraan atau penghubung (*betweenness centrality*). Dalam hal ini akan memperlihatkan posisi dari seorang aktor yang berlaku sebagai perantara (*betweenness*) dari hubungan aktor satu dengan lainnya dalam suatu jaringan. Dari analisis visual di atas, semakin tinggi nilai keperantaraan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, maka semakin penting posisinya karena menunjukkan aktor lain dapat terhubung dengan adanya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sehingga membentuk jaringan penghubung dengan aktor lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil data penelitian, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini. Berikut kesimpulan penelitian ini:

- a. *Type of Ties* atau jenis ikatan yang terjalin dalam proses *policy network* menunjukkan adanya pola ketergantungan dan hubungan timbal balik antar aktor. Tidak hanya itu, secara hukum memang tidak ada aturan yang mengatur terkait kolaborasi dari jejaring kebijakan antar aktor. Namun, dalam prosesnya semua pihak berkolaborasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Hal ini juga didasarkan pada pedoman pembangunan sektor pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Jenis ikatan ini terbukti dengan adanya pertukaran informasi yang dilakukan melalui berbagai hal diantaranya dengan mengadakan rapat koordinasi, rapat kerja, dan pertemuan non formal. Tidak hanya itu, proses pertukaran informasi ini juga menggunakan media online seperti *whatsapp group* dan *e-office*. Tidak ada kekuasaan dominan dan hubungan kekuasaan yang terjalin dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing aktor yang terlibat.
- b. *Type of Level Governance* atau jenis tingkat pemerintahan menunjukkan bahwa tingkat pemerintahan dalam proses jejaring kebijakan ini

disesuaikan dengan hirarki yang ada dalam lingkup pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Susunan hirarki tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, secara lebih khusus di Kota Yogyakarta terdapat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pola Koordinasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Tingkat dalam pemerintahan ini berkaitan juga dengan kontribusi dan peran masing-masing aktor. Sesuai dengan data penelitian, masing-masing aktor sudah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan pedoman hukum atau kebijakan yang mengatur tentang tugas, pokok, dan fungsinya. Apabila dilihat melalui tugasnya, kemudian memunculkan beberapa aktor yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang cukup tinggi dalam proses pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta diantaranya yaitu Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY, GIPI DIY, ASITA DIY, Sekda Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, BP2KY, Forkom Kampung Wisata, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Dinas Lingkungan Hidup, serta Masyarakat Lokal Kota Yogyakarta.

- c. *Type of Policy Goals* atau jenis tujuan kebijakan dimana dalam pengembangan pariwisata kota berkelanjutan di Kota Yogyakarta ini berpedoman pada beberapa kebijakan diantaranya yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2025; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025. Selain itu, terdapat pula Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan. Pembangunan pariwisata kota berkelanjutan ini pada kenyataannya tidak bisa hanya berfokus pada satu aktor saja, tetapi memerlukan bantuan dari aktor lainnya. Salah satu masalah pariwisata yang masih ada di Kota Yogyakarta adalah terkait dengan masalah sampah di kawasan wisata dan kemudian muncul Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Tidak hanya itu, aktor lainnya juga berperan dalam proses jejaring kebijakan sesuai dengan fokus dan sumber daya yang dimiliki.

Referensi

- [1] Riani, N. "Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2". *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 2, no.5, pp. 1469-1474, 2021. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.923>.
- [2] Purnama, Andi ODAA. "Pengembangan Pariwisata Perkotaan Temendao Berbasis Masyarakat di Kota Gorontalo". *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, vol. 2, no. 2, pp. 58-69, 2022.
- [3] Pavlic, Ivana. et al. "Urban Tourism Towards Sustainable Development". *International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science*, vol. 1, no. 1, pp. 72-79, 2022.

- [4] Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. *Jumlah Kunjungan Wisata Kota Yogyakarta Tahun 2023*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023.
- [5] Wicaksono, AS. & Suharto. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, vol. 2, no. 1, pp. 50-57, 2023.
- [6] Widari, Dewa ADS. "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoritis dan Empiris". *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, vol.1, no.1, pp. 1-11, 2020.
- [7] Rulinawaty. *Resources Sharing: Aktor Publik, Jaringan Kebijakan, dan Perubahan Kebijakan*, LEPPI: Depok, 2020.
- [8] Mariane, I, dkk. "Model Policy Network dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 13, no. 2, pp. 171-180, 2022.
- [9] Huda, U & Marita A. "Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul". *Journal Student UNY*, vol. 2, no. 4, pp. 1-12, 2017.
- [10] Ahrens, Petra. "Qualitative network analysis: A useful tool for investigating policy networks in transnational settings?". *Journal Methodological Innovations*, vol. 11, no. 1, pp. 1-9, 2018.
- [11] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [12] BPS Kota Yogyakarta. *Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2024.
- [13] Lubis, Firsty RA & Zakiyyah, NA. "Tourism Development and Economics Growth: Case Study of Yogyakarta Province". *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol.4, no. 4, pp. 4127-4141, 2023.
- [14] Saputri, AD. dkk. "Sistem Urban Tourism Kota Madiun". *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, e-ISSN: 2798-0103, 2023.
- [15] Ryan, L. & Dahinden, J. "Qualitative Network Analysis For Migration Studies: Beyond Metaphors and Epistemological Pitfalls". *Global Diversities and Inequalities Research Centre*, vol.21, pp. 459-469, 2021. DOI: 10.1111/glob.12319
- [16] Tressa, R. "Policy Network Dalam Kebijakan Kontra Radikalisme di Kabupaten Poso". *Jurnal Ilmiah Administrative*, vol. 11, no. 1, pp. 30-42, 2018.